



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1 Sejarah Singkat**

KPP Pratama Tangerang Barat berada di jalan Imam Bonjol nomor 47 Karawaci, Tangerang. KPP Pratama Tangerang Barat ini diresmikan pada tanggal 28 Agustus 2007. KPP Pratama Tangerang Barat mempunyai sejarah panjang dalam perjalanannya menuju modernisasi seperti saat ini.

Pada mulanya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat merupakan hasil evolusi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tangerang yang dahulunya berasal dari Kantor Inspeksi Pajak (KIP) Serang. Pada saat masih menjadi Kantor Inspeksi Pajak Serang, kantor ini memiliki tiga Kantor Dinas Luar (KDL), antara lain :

1. Kantor Dinas Luar Ciputat;
2. Kantor Dinas Luar Balaraja;
3. Kantor Dinas Luar Tangerang.

Kemudian, seiring dengan berlalunya waktu, Kantor Inspeksi Pajak (KIP) mengalami perubahan nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sedangkan Kantor Dinas Luar (KDL) berganti nama menjadi Kantor Penyuluhan Pajak, yang pada akhirnya menjadi Kantor Penyuluhan dan

Pengamatan Potensi Pajak (KP4). Pada masa ini, akhirnya diresmikanlah Kantor Pelayanan Pajak Tangerang pada tanggal 1 Maret 1989.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tangerang ini berada di bawah koordinasi Kanwil VII Bandung. Pada masa ini pula, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tangerang memiliki wilayah kerja yang meliputi kabupaten Tangerang dan kotamadya Tangerang.

Seiring dengan perkembangan wilayah Tangerang serta adanya keinginan untuk memberikan pengawasan sekaligus pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak yang ada, maka KPP Tangerang mengalami pemecahan pada tahun 1994 menjadi :

- a. KPP Tangerang dengan wilayah kerja kotamadya Tangerang;
- b. KPP Serpong dengan wilayah kerja kabupaten Tangerang.

Setelah terbentuknya provinsi Banten, KPP Tangerang tidak lagi berada di bawah koordinasi Kanwil VII Bandung, namun berada di bawah koordinasi Kanwil VIII Serang yang pada akhirnya kini menjadi kanwil DJP Banten.

## **2.2 Visi Dan Misi KPP Pratama Tangerang Barat.**

Visi KPP Pratama Tangerang Barat adalah menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Misi KPP Pratama Tangerang Barat adalah menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang – undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem perpajakan yang efektif dan efisien.

## **2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi KPP Pratama Tangerang Barat.**

### **a. Tugas Pokok KPP Pratama**

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## b. Fungsi KPP Pratama

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. penyuluhan perpajakan;
- e. pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
- f. pelaksanaan ekstensifikasi;
- g. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- h. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- i. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- j. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- k. pelaksanaan intensifikasi;
- l. pembetulan ketetapan pajak;
- m. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- n. pelaksanaan administrasi kantor.

## 2.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Tangerang Barat

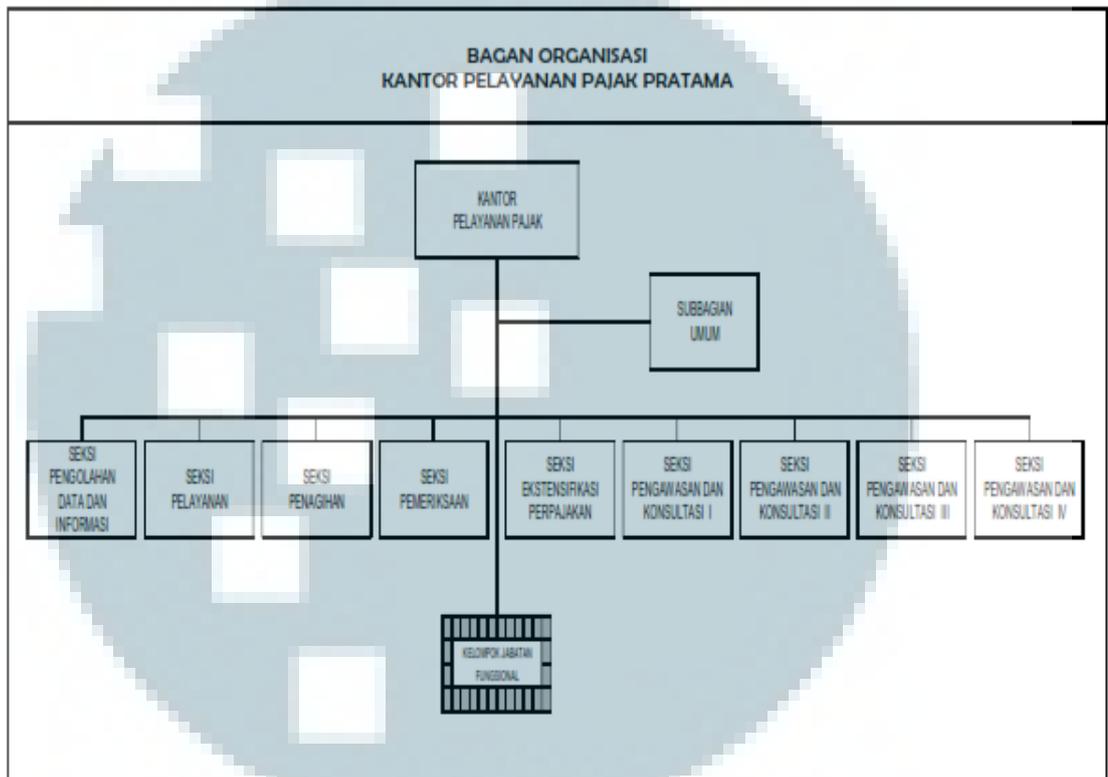
Struktur Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain.

Secara umum, struktur organisasi dari suatu KPP Pratama terdiri dari 11 seksi, yaitu Subbagian Umum, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pelayanan, Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat, struktur organisasi yang dipakai adalah bentuk struktur organisasi Garis dan Staff, yaitu suatu bentuk organisasi dengan pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pucuk pimpinan ke kepala bagian di bawahnya serta masing- masing pejabat, manager ditempatkan satu atau lebih pejabat staff yang tidak mempunyai wewenang memerintah tetapi hanya sebagai penasihat, misalnya mengenai masalah pelayanan, ekstensi, penagihan, dan lain sebagainya.

Gambar 2.1

### Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat



sumber : diolah dari Seksi Subbagian Umum

Setelah mengalami modernisasi sistem administrasi perpajakan, struktur dan uraian pekerjaan masing-masing jabatan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat, meliputi:

#### 1. Kepala Kantor

- a. Memimpin dan mengkoordinir seluruh pekerja kantor.
- b. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang pemeriksaan dan penagihan.

- c. Bertanggung jawab terhadap tugas dan memiliki kewenangan untuk memajukan Kantor Pelayanan Pajak, antara lain dengan cara menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan serta realisasi penerimaan pajak tahun lalu dan menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi / ekstensifikasi perpajakan.

## 2 . Subbagian Umum

- a. Mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, seperti menyelenggarakan pengurusan surat-surat masuk atau berkas dokumen yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku; menyelenggarakan penyusunan surat keluar agar komunikasi administrasi berjalan dengan lancar; menyimpan surat dan dokumen untuk memudahkan penemuan kembali surat atau dokumen yang diperlukan; membuat konsep rencana kerja subbagian umum; menyiapkan bahan penyusunan konsep usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS); menyiapkan bahan penyusunan konsep usulan kenaikan pangkat pegawai golongan II/d ke bawah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; membuat konsep surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, dan menyiapkan bahan penyusunan konsep usulan calon peserta diklat.

- b. Urusan Keuangan, seperti melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji/rapel, gaji/kekurangan gaji, dan/atau lembur para pegawai; meng-*update* data daftar gaji berdasarkan mutasi kepegawaian; membuat konsep Daftar Perencanaan Pembiayaan Kantor Pelayanan Pajak; menyiapkan surat permintaan pembayaran/SSP sebagai Uang Persediaan (UP) atau UP Tambahan; dan menyiapkan SPPR-LS sebagai pembayaran langsung atas tagihan pihak ketiga.
- c. Urusan Rumah Tangga, seperti membuat konsep perencanaan dan pengadaan Alat Perlengkapan Kantor (ATK) atau formulir sesuai dengan batas kewenangannya berdasarkan rencana anggaran dalam DIPA; melaksanakan penyimpanan dan pendistribusian alat perlengkapan kantor; mencatat dan memberi kode klasifikasi lokasi inventaris serta menyelenggarakan pembukuan inventaris kantor; dan meneliti barang-barang inventaris kantor yang rusak dan tidak terpakai lagi serta membuat konsep daftar usulan penghapusan dan pemusnahannya.

### 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Seksi PDI)

- a. Melakukan pengumpulan dan pencarian data perpajakan.
- b. Penatausahaan data masukan dan data keluaran.
- c. Perekaman data perpajakan.
- d. Pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan.

- e. Pengolahan data perpajakan.
- f. Analisis informasi perpajakan.
- g. Penyajian informasi perpajakan.
- h. Pelayanan dukungan teknis komputer.
- i. Pemantauan aplikasi e-SPT dan *e-filing*.
- j. Penyiapan laporan kinerja.

#### 4. Seksi Pelayanan

- a. Melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan.
- b. Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- c. Penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 5. Seksi Penagihan

- a. Melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak.
- b. Melakukan penagihan aktif terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi pembayaran pajak.
- c. Pembuatan usulan penghapusan piutang pajak.
- d. Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

## 6. Seksi Pemeriksaan

- a. Melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
- b. Penatausahaan pemeriksaan rutin.
- c. Pengusulan pemeriksaan rutin.
- d. Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3).
- e. Pemeriksaan Lapangan oleh Fungsional Pemeriksa.
- f. Perekaman nota hitung.

## 7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

- a. Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan.
- b. Pencarian data dari pihak ketiga.
- c. Pendataan obyek dan subyek pajak.
- d. Penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

## 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Seksi Waskon)

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
- b. Bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan.
- c. Penyusunan profil wajib pajak.
- d. Analisis kinerja wajib pajak.
- e. Melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi.

f. Melakukan evaluasi hasil banding

## 9. Kelompok Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Kantor Wilayah DJP. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat.

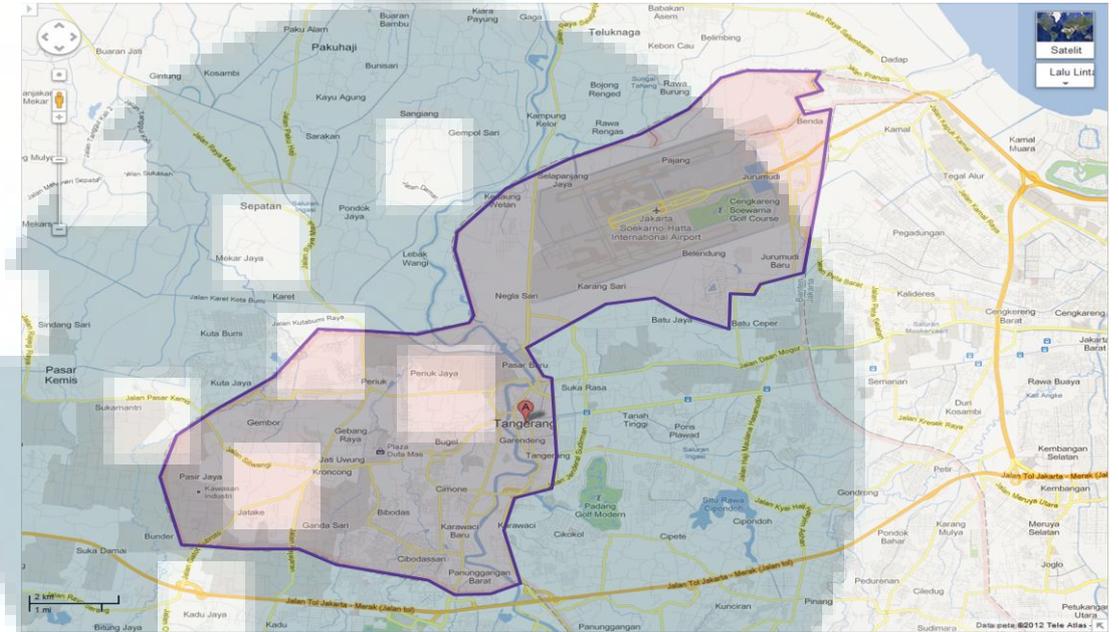
### 2.5 Wilayah Kerja KPP Pratama Tangerang Barat.

KPP Pratama Tangerang Barat memiliki wilayah kerja sekitar 69,04 km<sup>2</sup> atau sekitar 48,28 % dari luas wilayah keseluruhan kota Tangerang. Berikut ini adalah gambaran peta wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat.

UMMN

Gambar 2.2

### Wilayah Kerja KPP Tangerang Barat



sumber : diolah dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Secara umum, wilayah kerja KPP Pratama Tangerang Barat terdiri dari 6 kecamatan dari total 13 kecamatan di kota Tangerang. Enam kecamatan yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Tangerang Barat ini antara lain :

- a. Cibodas;
- b. Neglasari;
- c. Karawaci;
- d. Benda;
- e. Periuk; dan
- f. Jatiuwung.

Dari 6 kecamatan yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Tangerang Barat ini, terdapat 45 kelurahan di kota Tangerang yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

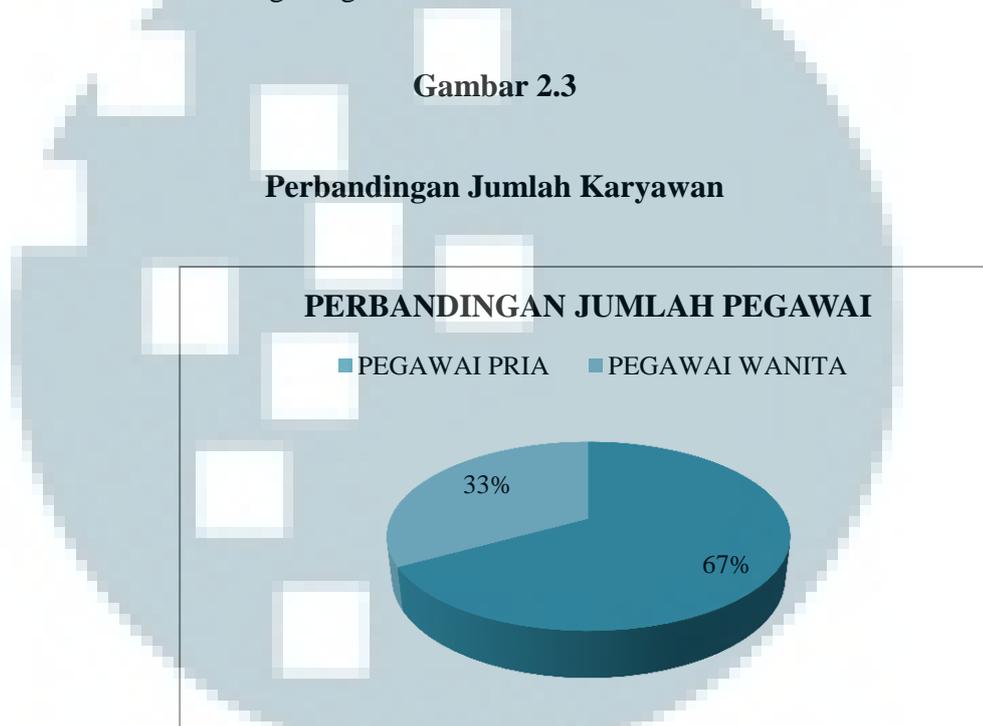
**Tabel 2.1**  
**Wilayah Kerja KPP Pratama Tangerang Barat**

Kecamatan	Desa / Kelurahan
Cibodas	Panunggangan Barat, Cibodasari, Cibodas, Uwungjaya, Jatiuwung, Cibodasbaru.
Neglasari	Neglasari, Karang Sari, Selapajang Raya, Kedaung Wetan, ,Mekarsari, Karanganyar, Kedaung Baru.
Karawaci	Karawaci Baru, Karawaci, Gerendeng, Pabuaran, Cimone, Bugel, Pabuaran Tumpeng, Pasar Baru, Nusa Jaya, Bojong Jaya, Sumur Pacing, Sukajadi, Margasari, Koang Jaya, Cimone Jaya, Nambo Jaya.
Benda	Benda, Jurumudi, Jurumudi Baru, Pajang, Blendung.
Periuk	Gembor, Gebang Raya, Periuk, Periuk Jaya, Sangiang Jaya.
Jatiuwung	Pasir Jaya, Jatake, Gandasari, Keroncong, Manis Jaya, Alam Jaya.

sumber : diolah dari Seksi Penagihan

## 2.6 Struktur Pegawai KPP Pratama Tangerang Barat

Gambaran perbandingan jumlah pegawai wanita dengan pegawai pria di KPP Pratama Tangerang Barat:



sumber : diolah dari Seksi Subbag Umum

KPP Pratama Tangerang Barat terdiri dari 106 pegawai, yang terdiri dari 71 orang pegawai pria atau 67% dari keseluruhan pegawai di KPP dan 35 orang pegawai wanita atau 33% dari keseluruhan pegawai di KPP. Dari seluruh pegawai ini, terdapat 8 pegawai yang ditugaskan di bagian *VAT refund* di bandara Soekarno Hatta.

Jumlah keseluruhan pegawai di KPP Pratama Tangerang Barat ini termasuk paling banyak di dalam lingkup Kanwil DJP Banten. Dimana pada

umumnya dalam satu Kantor Pelayanan Pajak hanya terdapat 89 orang pegawai. Dibawah ini merupakan data tabel jumlah pegawai KPP Pratama Tangerang Barat.

**Tabel 2.2**  
**Daftar Pegawai KPP Prtama Tangerang Barat**

	<b>Seksi</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
1	Sub Bagian Umum	11
2	Pelayanan	29
3	Ekstensifikasi Perpajakan	7
4	Pengolahan Data dan Informasi	4
5	Pengawasan dan Konsultasi I	9
6	Pengawasan dan Konsultasi II	7
7	Pengawasan dan Konsultasi III	7
8	Pengawasan dan Konsultasi IV	9
9	Pemeriksaan	3
10	Penagihan	5
11	Pemeriksa Pajak	14
12	Penilai PBB	1
<b>Total</b>		<b>106</b>

sumber : diolah dari Seksi Subbag Umum

Seluruh pegawai di KPP Pratama Tangerang Barat dibagi ke beberapa seksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dari tabel 2.2 ini diketahui bahwa pada seksi Subbagian umum terdiri atas 11 orang pegawai, seksi pelayanan terdiri atas 29 orang pegawai, seksi Ekstensifikasi Perpajakan terdiri atas 7 orang pegawai, seksi Pengolahan Data dan Informasi terdiri atas 4 orang pegawai, Pengawasan Dan Konsultasi terdiri atas 32 orang pegawai, seksi Pemeriksaan terdiri atas 3 orang pegawai, seksi Penagihan terdiri atas 5 orang pegawai, serta kelompok Jabatan Fungsional Pajak sebanyak 15 orang pegawai.

### **2.7 Data Wajib Pajak Di KPP Pratama Tangerang Barat.**

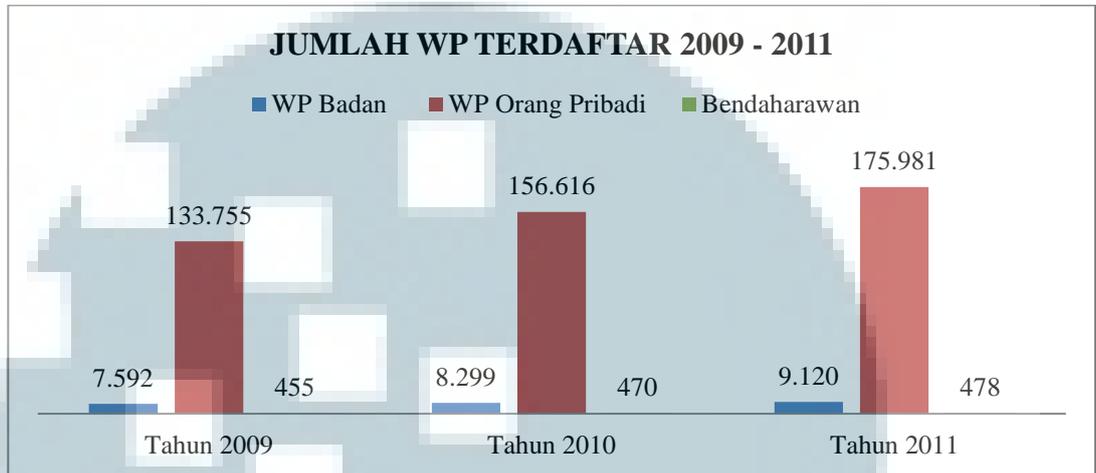
Secara umum, Wajib Pajak di KPP Pratama Tangerang Barat terdiri atas tiga jenis, yaitu :

- a. Wajib Pajak Badan;
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi; dan
- c. Bendaharawan.

Berikut ini adalah gambaran jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat.

**Gambar 2.4**

**Jumlah WP terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat**



sumber : diolah dari Seksi Penagihan

Gambaran jumlah wajib pajak efektif di KPP Pratama Tangerang Barat:

**Gambar 2.5**

**Jumlah WP Efektif di KPP Pratama Tangerang Barat**



sumber : diolah dari Seksi Penagihan

Berdasarkan gambar 2.4 dan 2.5 , maka diketahui bahwa dari tahun 2009 hingga tahun 2011 terdapat peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat. Umumnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi mendominasi dari keseluruhan Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat.



UMMN